

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	19
3. Tujuan Penelitian.....	19
4. Manfaat Penelitian.....	20

5.	Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	20
6.	Metode Penelitian.....	68
7.	Sistematika Penulisan.....	72

**BAB II KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI.....74**

1.	Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Bentuk Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	74
2.	Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Bentuk Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	87
3.	Kewenangan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.....	98

**BAB III KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PELAKSANAAN
PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....137**

1.	Tumpang Tindih Kewenangan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Melalui Pendekatan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy).....	137
----	--	-----

2.	Kebijakan Formulasi Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan di Masa Akan Datang (Ius Constitutum).....	150
2.1.1.	Akibat Hukum Terhadap Tumpang Tindih Kewenangan Pelaksanaan Putusan Pengadilan	150
2.2.2.	Upaya Pembaharuan Hukum Pidana (Penal Reform) Pada Pengembalian Kewenangan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	155
BAB III	KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI.....	175
5.1.1.1.	Kesimpulan.....	175
5.1.1.2.	Keterbatasan Penelitian.....	178
5.1.1.3.	Rekomendasi.....	179
DAFTAR BACAAN.....		182